

IMPLEMENTASI KETAATAN HUKUM PADA SISWA
(Studi Kasus Pelaksanaan Tata Tertib Sekolah di SMP Muhammadiyah 1
Kartasura Tahun Pelajaran 2012/2013)

NASKAH PUBLIKASI

Untuk memenuhi sebagian persyaratan guna mencapai
derajat Sarjana S-1 Program Studi Pendidikan
Pancasila dan Kewarganegaraan



Disusun oleh:

NOVITA ARDI

A.220090022

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2013

PERSETUJUAN NASKAH PUBLIKASI

IMPLEMENTASI KETAATAN HUKUM PADA SISWA

(Studi Kasus Pelaksanaan Tata Tertib Sekolah di SMP Muhammadiyah 1

Kartasura Tahun Pelajaran 2012/2013)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

NOVITA ARDI

A.220090022

Telah Disetujui untuk Dipertahankan di Depan Dewan Penguji Skripsi

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi

Pendidikan Kewarganegaraan

Pembimbing,



Prof. Dr Bambang Sumardjoko

NIK. 131470269

**IMPLEMENTASI KETAATAN HUKUM PADA SISWA
(Studi Kasus Pelaksanaan Tata Tertib Sekolah di SMP Muhammadiyah 1
Kartasura Tahun Pelajaran 2012/2013)**

Novita Ardi, A220090022, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
(PPKn), Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah
Surakarta, 2013, 68 halaman

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk tata tertib, ciri-ciri ketaatan hukum siswa pada pelaksanaan tata tertib sekolah, dan pemberian sanksi bagi siswa yang melanggar tata tertib sekolah di SMP Muhammadiyah 1 Kartasura Tahun pelajaran 2012/2013. Metode penelitian ini yaitu studi kasus karena memfokuskan pada kasus tertentu. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Bentuk-bentuk tata tertib sekolah di SMP Muhammadiyah 1 Kartasura Tahun pelajaran 2012/2013, antara lain yaitu tentang kehadiran peserta didik di kelas/sekolah, tentang ketenangan dan ketertiban, tentang kewajiban mengikuti pelajaran, tentang pakaian dan kerapian, tentang kesopanan/tingkah laku, tentang berdo'a dan sholat berjama'ah, tentang kendaraan, tentang pembayaran SPP, tentang pelanggaran dan sanksi; 2) Ciri-ciri ketaatan hukum siswa pada pelaksanaan tata tertib, dapat diketahui dengan melihat buku catatan pelanggaran dan nilai kredit penyimpangan sikap/perilaku/budipekerti; 3) Pemberian sanksi bagi siswa yang melanggar tata tertib sekolah, dengan melihat bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh siswa. Apabila pelanggaran tersebut ringan, siswa dihukum menghafalkan surat pendek, menjalankan sholat dhuha dan lain sebagainya. Sanksi pelanggaran berat yaitu siswa dikeluarkan. Selain mendapat sanksi dari pihak sekolah, siswa mendapatkan nilai kredit poin penyimpangan.

Kata Kunci: Tata tertib, Ketaatan hukum, Nilai kredit penyimpangan

Surakarta, April 2013

Penulis

(Novita Ardi)

PENDAHULUAN

Semua orang wajib bertindak dan bertingkahtaku sesuai dengan aturan hukum, sehingga ketertiban dan keamanan dalam masyarakat itu tetap terpelihara dengan baik. Oleh karena itu hukum meliputi berbagai peraturan yang mengatur hubungan orang yang satu dengan yang lain, yaitu peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan. Mustakim, (2000:3), mengemukakan bahwa:

Menyadari adanya peraturan hukum (atau biasanya disebut hukum saja) yang bersifat mengatur dan memaksa tersebut maka hendaknya hukum selalu dijadikan pedoman dalam bertingkahtaku bagi anggota masyarakat, berbuat menurut hukum sama artinya menuju pada kesempurnaan hidup yang harmoni dalam masyarakat sedangkan berbuat tidak sesuai hukum sama artinya dengan kegagalan hidup bermasyarakat, selain mendapat celaan masyarakat pelanggar hukum juga akan menerima sanksi hukum.

Peraturan hukum bersifat mengatur dan memaksa. Mengatur dan memaksa disini bertujuan agar seluruh anggota masyarakat patuh mentaati semua aturan yang berlaku. Pelanggaran atas peraturan hukum tersebut akan dikenakan sanksi, berupa hukuman sebagai reaksi terhadap perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukannya. Untuk menjaga supaya peraturan-peraturan hukum dapat berlangsung dan diterima oleh seluruh anggota masyarakat, maka peraturan hukum yang ada harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan aturan yang ada dan asas-asas keadilan dari masyarakat tersebut.

Kepatuhan terhadap hukum tidak hanya dilakukan kadangkala saja, melainkan harus dilakukan dengan kesadaran bahwa hukum diciptakan untuk melindungi masyarakat. Ketaatan atau kepatuhan terhadap hukum yang berlaku merupakan konsep nyata dalam diri seseorang yang diwujudkan dalam perilaku yang sesuai dengan sistem hukum yang berlaku, tingkat kepatuhan terhadap hukum secara langsung menunjukkan kesadaran hukum. Orang yang mempunyai kesadaran terhadap berbagai aturan hukum akan mematuhi semua yang menjadi tuntunan peraturan tersebut, sehingga mereka akan menjadi taat terhadap berbagai peraturan yang ada. Erwin (2011:135) mengemukakan bahwa:

Dalam situasi yang konkret kesadaran hukum akan menjelma dalam bentuk kepatuhan atau ketaatan terhadap hukum. Kepatuhan terhadap hukum begitu tergantung pada pertumbuhan akal, kemauan dan rasa seseorang. Ada orang yang patuh terhadap hukum karena takut dengan hukuman, ada yang patuh

terhadap hukum demi kesedapan hidup bersama, ada yang karena sesuai dengan cita hukumnya, ada pula yang karena kepentingan. Namun, pada akhirnya, jika kesadaran hukum itu datang, orang hanya mempunyai dua pilihan, mau menerima atau menolak.

Ketaatan hukum merupakan ketaatan yang dimulai dari kesadaran masyarakat terhadap hukum. Kesadaran hukum berupa keyakinan akan nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum. Orang yang mengalami dan merasakan keyakinan bahwa suatu perbuatan yang konkret, harus dilaksanakan atau tidak sama sekali.

Ketaatan pada hukum tidak hanya terwujud pada ketaatan hukum yang ada di dalam masyarakat maupun di kalangan pemerintahan saja, tetapi juga terwujud dalam instansi-instansi termasuk lembaga pendidikan atau sekolah-sekolah. Kehidupan di lingkungan masyarakat maupun sekolah tidak lepas dari aturan-aturan yang berlaku didalamnya, baik aturan yang tertulis maupun aturan yang tidak tertulis. Aturan-aturan tersebut harus ditaati sepenuhnya. Adanya aturan tersebut adalah agar tercipta kemakmuran dan keadilan dalam lingkungan masyarakat. Apabila aturan-aturan tersebut dilanggar, akan mendapatkan sanksi yang tegas.

Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal, yang mempunyai kebijakan tertentu dalam meningkatkan ketaatan hukum di lingkungan sekolah. Kebijakan tersebut dituangkan dalam bentuk aturan yang didalamnya terdapat tata tertib yang harus ditaati oleh semua siswa. Kewajiban siswa dalam menaati tata tertib sekolah merupakan hal yang penting, sebab merupakan bagian dari sistem sekolah. Tata tertib sekolah dibuat agar siswa dapat mengontrol diri dan bertanggungjawab serta berperilaku sesuai dengan norma yang ada di lingkungan sekolah. Tata tertib di sekolah ada yang berbentuk tertulis dan ada yang berbentuk tidak tertulis.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk tata tertib, ciri-ciri ketaatan hukum siswa pada pelaksanaan tata tertib sekolah, dan pemberian sanksi bagi siswa yang melanggar tata tertib sekolah di SMP Muhammadiyah 1 Kartasura Tahun pelajaran 2012/2013.

METODE PENELITIAN

Tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian ini SMP Muhammadiyah 1 Kartasura. Waktu pelaksanaan penelitian ini berlangsung selama empat bulan yaitu mulai bulan Desember 2012 sampai bulan Maret 2013.

Jenis Penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, menekankan pada latar belakang struktur dan individu secara utuh yang secara deskriptif menggambarkan keadaan subyek dan obyek penelitian berdasarkan fakta. Definisi menurut Denzil dan Lincoln (1987) sebagaimana dikutip Moleong (2004: 5), memberikan gambaran bahwa penelitian kualitatif mengutamakan latar alamiah dengan maksud agar hasilnya dapat digunakan untuk menafsirkan fenomena dan yang dimanfaatkan untuk penelitian kualitatif adalah berbagai macam metode penelitian.

Strategi Penelitian. Strategi penelitian ini adalah studi kasus tunggal. Menurut Creswell (1998) sebagaimana dikutip Herdiansyah (2010: 76), menyatakan bahwa studi kasus merupakan suatu model yang menekankan pada eksplorasi dari suatu “sistem yang terbatas” pada satu kasus atau beberapa kasus yang mendetail, disertai dengan penggalian data secara mendalam yang melibatkan beragam sumber informasi yang kaya akan konteks.

Selanjutnya Ratna (2010: 193), menyatakan bahwa jenis studi kasus ada dua macam, yaitu: a) studi kasus tunggal, yang memungkinkan untuk melakukan penelitian secara lebih mendalam (bersifat eksploratif, terfokus pada sejumlah kecil kejadian), b) studi kasus majemuk atau kolektif, yang memberikan kemungkinan untuk menganalisis perbedaan dan persamaan antar kasus. Jadi peneliti menggunakan studi kasus tunggal yang memungkinkan untuk penelitian lebih mendalam dan memusatkan perhatian pada satu kasus yang lebih mendetail.

Teknik Pengumpulan Data. Maryadi dkk. (2011: 14), menyatakan bahwa teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang digunakan adalah teknik yang memungkinkan diperoleh data detail dengan waktu yang relatif lama, misalnya wawancara mendalam, observasi langsung (partisipatif maupun non

partisipasif), serta mencatat arsip dan dokumen. Dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu:

a. *Observasi*. Menurut Menurut Tanzeh (2011: 88), menyatakan bahwa “pengamatan langsung adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut”. Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi mengenai keadaan sekolah, guru dan pihak sekolah untuk mengetahui implementasi ketaatan hukum pada tata tertib sekolah di SMP Muhammadiyah 1 Kartasura.

b. *Wawancara*. Menurut Esterberg (2002) sebagaimana yang dikutip Sugiyono (2007: 231), “wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu”. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mengajukan beberapa pertanyaan tidak terstruktur mengenai bentuk-bentuk tata tertib sekolah, ciri-ciri ketaatan hukum siswa, serta pemberian sanksi bagi siswa yang melanggar tata tertib sekolah di SMP Muhammadiyah 1 Kartasura.

c. *Dokumentasi*. Menurut Sukmadinata (2009: 221), dokumentasi merupakan “teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik. Dokumentasi yang diperlukan dalam penelitian ini berupa buku atau catatan peristiwa yang sudah berlalu mengenai mengenai bentuk-bentuk tata tertib sekolah, ciri-ciri ketaatan hukum siswa pada pelaksanaan tata tertib sekolah, serta pemberian sanksi bagi siswa yang melanggar tata tertib sekolah di SMP Muhammadiyah 1 Kartasura.

Instrumen pengumpulan Data. Sugiyono (2007: 222), menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu peneliti sebagai instrumen juga harus “divalidasi” seberapa jauh peneliti kualitatif siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun ke lapangan. Validasi terhadap peneliti sebagai instrumen meliputi validasi terhadap pemahaman metode penelitian kualitaitaif, penguasaan

wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti memasuki objek penelitian, baik secara akademik maupun longistiknya.

HASIL PENELITIAN

1. Bentuk-bentuk tata tertib sekolah di SMP Muhammadiyah 1 Kartasura Tahun pelajaran 2012/2013.

Bentuk-bentuk tata tertib sekolah yang ada di SMP Muhammadiyah 1 Kartasura bermacam-macam. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dias Fatoni, S.Psi selaku salah satu guru BK (bimbingan konseling) di SMP Muhammadiyah 1 Kartasura pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2013, menyatakan bahwa “pada intinya tata tertib sekolah disini menekankan pada kebersihan, kerapian, kesopanan dan sebagainya, itu yang kami tekankan di dalam tata tertib sekolah”. Kemudian hasil wawancara peneliti dengan Bp. Candra Maulana, S.Pd selaku guru kesiswaan SMP Muhammadiyah 1 Kartasura pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2013, mengemukakan bahwa:

Bentuk-bentuk tata tertib sekolah dilihat dari segi pakaian, hari Senin-Selasa siswa memakai baju Osis, hari Rabu-Kamis siswa memakai baju IRM, hari Jum'at siswa memakai baju HW, dan hari Sabtu siswa memakai baju batik. Kemudian mengenai tingkah laku siswa, mengenai kebersihan, dan sebagainya.

Selain pertanyaan kepada guru BK dan guru kesiswaan, peneliti juga melakukan wawancara dengan siswa. Wawancara yang dilakukan peneliti secara acak dengan beberapa siswa kelas VII, VIII, dan IX, baik laki-laki maupun perempuan. Berdasarkan hasil observasi peneliti pada bulan Februari 2013, dapat disimpulkan mengenai bentuk-bentuk tata tertib sekolah oleh beberapa siswa, antara lain meliputi: mengenai seragam, kebersihan, sholat, kerapian.

2. Ciri-ciri ketaatan hukum siswa pada pelaksanaan tata tertib sekolah di SMP Muhammadiyah 1 Kartasura Tahun pelajaran 2012/2013.

Setiap instansi sekolah memiliki tata tertib sendiri yang mengatur semua warga yang ada di dalam sekolah. Selain tata tertib sekolah, SMP Muhammadiyah 1 Kartasura juga memiliki tata krama dalam mengatur kehidupan sosial sekolah. Tatakrma dan tata tertib sekolah tersebut dimaksudkan sebagai rambu-rambu

bagi siswa dalam bersikap dan bertingkah laku, bertindak, dan melaksanakan kegiatan sehari-hari di sekolah, dalam rangka menciptakan iklim dan kultur sekolah yang dapat menunjang kegiatan pembelajaran yang efektif. Tatakrama dan tata tertib sekolah tersebut, dibuat berdasarkan nilai-nilai yang dianut sekolah dan masyarakat sekitar, yang meliputi nilai ketaqwaan, sopan santun pergaulan, kedisiplinan, dan ketertiban, kebersihan, kesehatan, kerapian, keamanan, dan nilai-nilai yang mendukung kegiatan belajar yang efektif.

Ibu Dias Fatoni, S.Psi selaku salah satu guru BK (bimbingan konseling) di SMP Muhammadiyah 1 Kartasura pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2013, mengemukakan bahwa “untuk mengetahui ciri-ciri ketaatan hukum siswa, kita akan lihat perpointnya. Apabila masalahnya kerapian, kita akan tau ciri-ciri siswa seperti berseragam rapi. Dari segi kebersihan, jika kelasnya bersih berarti tidak ada pelanggaran tata tertib sekolah”.

Beberapa teknik pengumpulan data tersebut dapat dirumuskan bahwa ciri-ciri ketaatan hukum pada siswa SMP Muhammadiyah 1 Kartasura, adalah dengan melihat buku catatan pelanggaran dan nilai kredit penyimpangan sikap/perilaku/-budipekerti. Selain dengan buku catatan dan nilai kredit, ciri-ciri ketaatan siswa dapat dilihat secara langsung dari segi kebersihan siswa dikelas, segi kerapian cara berpakaian siswa, dari segi tindakan siswa, dan lain sebagainya. Ciri-ciri ketaatan hukum siswa juga terlihat dari siswa yang mentaati peraturan yang ada dan tidak melanggar peraturan.

3. Pemberian sanksi bagi siswa yang melanggar tata tertib sekolah di SMP Muhammadiyah 1 Kartasura Tahun pelajaran 2012/2013.

Peraturan merupakan suatu hal yang harus dipatuhi dan ditaati. Untuk mempertegas adanya peraturan yang mengikat suatu individu, maka terdapat adanya sanksi yang menjadi akibat dari perbuatan yang melanggar peraturan. Hasil wawancara peneliti dengan Ibu Dias Fatoni, S.Psi selaku salah satu guru BK SMP Muhammadiyah 1 Kartasura pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2013, menyatakan bahwa:

Sanksi yang diberikan pihak sekolah bersifat mendidik. Contohnya, siswa yang terlambat akan dihukum dengan hafalan surat pendek. Jika pelanggaran cukup berat, akan dihukum harus menjalankan sholat dhuha,

absensi harus datang maksimal pukul 06.30 WIB, dan setelah sampai di sekolah akan mendapat hukuman tadarus, hafalan surat dan sebagainya. Kalau misalnya ada yang terlambat kita tidak mungkin memberikan sanksi tetapi dengan langsung memberikan teguran kepada siswa. Jika harus ada pemulangan kita biasanya berkoordinasi dengan wali kelas. Kalau ada pelanggaran lagi kita akan mengadakan peringatan. Jika dalam ketiga kalinya melakukan pelanggaran, kita akan mengadakan pemanggilan sebanyak tiga kali, dan untuk ketiga kalinya sampai kepala sekolah. jadi keputusan akhir ada disana.

Beberapa teknik pengumpulan data tersebut dapat dirumuskan bahwa pemberian sanksi bagi siswa yang melanggar tata tertib sekolah adalah, dengan melihat bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh siswa. Apabila pelanggaran tersebut ringan, siswa dihukum menghafalkan surat pendek, menjalankan sholat dhuha dan lain sebagainya. Sanksi pelanggaran berat yaitu siswa dikeluarkan atau dikembalikan kepada orang tua atau wali siswa.

Setiap siswa yang melakukan pelanggaran, selain mendapat sanksi dari pihak sekolah juga mendapatkan nilai kredit poin penyimpangan. Nilai kredit diberikan kepada siswa setiap kali melakukan penyimpangan sesuai dengan bobot nilai kredit penyimpangan, tetapi apabila poin pelanggaran tersebut mencapai 200 poin, maka pihak sekolah melakukan pengeluaran atau pengembalian siswa kepada orang tua/wali.

SIMPULAN

1. Bentuk-bentuk tata tertib sekolah di SMP Muhammadiyah 1 Kartasura Tahun pelajaran 2012/2013, antara lain yaitu tentang kehadiran peserta didik di kelas/sekolah, tentang ketenangan dan ketertiban, tentang kewajiban mengikuti pelajaran, tentang pakaian dan kerapian, tentang kesopanan/tingkah laku, tentang berdo'a dan sholat berjama'ah, tentang kendaraan, tentang pembayaran SPP, tentang pelanggaran dan sanksi.
2. Ciri-ciri ketaatan hukum siswa pada pelaksanaan tata tertib sekolah di SMP Muhammadiyah 1 Kartasura Tahun pelajaran 2012/2013, dapat diketahui dengan melihat buku catatan pelanggaran dan nilai kredit penyimpangan sikap/perilaku/budipekerti. Selain dengan buku catatan dan nilai kredit, ciri-ciri

ketaatan siswa dapat dilihat secara langsung dari segi kebersihan siswa dikelas, segi kerapian cara berpakaian siswa, dari segi tindakan siswa, dan lain sebagainya.

3. Pemberian sanksi bagi siswa yang melanggar tata tertib sekolah di SMP Muhammadiyah 1 Kartasura Tahun pelajaran 2012/2013, adalah dengan melihat bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh siswa. Apabila pelanggaran tersebut ringan, siswa dihukum menghafalkan surat pendek, menjalankan sholat dhuha dan lain sebagainya. Sanksi pelanggaran berat yaitu siswa dikeluarkan atau dikembalikan kepada orang tua atau wali siswa. Selain mendapat sanksi dari pihak sekolah juga mendapatkan nilai kredit poin penyimpangan. Nilai kredit diberikan kepada siswa setiap kali melakukan penyimpangan sesuai dengan bobot nilai kredit penyimpangan, tetapi apabila poin pelanggaran tersebut mencapai 200 poin, maka pihak sekolah melakukan pengeluaran atau pengembalian siswa kepada orang tua/wali.

DAFTAR PUSTAKA

- Erwin, Muhamad. 2011. *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Herdiansyah, Haris. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Maryadi, dkk. 2011. *Pedoman Penulisan Skripsi FKIP*. Surakarta: BP-FKIP UMS.
- Mustakim, S.H. 2000. *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Hukum Indonesia*. Surakarta: Khazanah Ilmu.
- Moleong, J Lexy. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Ratna, Nyoman Kutha. 2010. *Metodologi Penelitian: Kajian Budaya dan Ilmu-Ilmu Sosial Humaniora pada Umumnya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

Sukmadinata, Nana Syaodih. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Tanzeh, Ahmad. 2011. *Metode Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras.